



PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT PESISIR

**SITI HAJAR
IRWAN SYARI TANJUNG
YURISNA TANJUNG
ZULFAHMI**



PENERBIT
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENULISAN ILMIAH
AQLI

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR

Siti Hajar
Irwan Syari Tanjung
Yurisna Tanjung
Zulfahmi



LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENULISAN ILMIAH
AQLI

Copyright © Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR

Penulis: Siti Hajar, Irwan Syari Tanjung, Yurisna Tanjung, Zulfahmi

Editor: Syafrida Hani

Desain Sampul: Iklil Mujahid Azhar

Cetakan Pertama: Oktober 2018

Diterbitkan oleh:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH AQLI

Jl. Pancing V Komp. Perumahan Permata Hijau No. 19

Medan, 20251

Website: <http://aqli.org>

Email: lpiaqli@gmail.com

Telpon: +62-88807824503

Penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi buku ini.

ISBN: 978-602-53067-2-3



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku monograf ini yang berjudul pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti sekaligus penulis dalam buku ini di Desa Paluh Manan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan sebuah fakta yang terdapat di daerah pesisir, yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) KEMENRISTEKDIKTI yang mendanai penelitian ini tentang Penerapan Pendekatan Partisipatoris dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mendukung dan mengkoordinasikan penelitian sehingga dapat menjadi sebuah buku monograf.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir untuk mendukung pembangunan desa di Desa Paluh Manan ini sangatlah rendah yang akhirnya tidak maksimal. Masyarakat pesisir yang berada di daerah ini, mempunyai pendidikan yang rendah dan mengakibatkan tidak berkembangnya pemikiran yang maju dari masyarakat sekitar desa ini. Maka, melalui model pemberdayaan masyarakat dapat melahirkan atau menciptakan masyarakat yang kreatif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di segala bidang.

Masyarakat pesisir di Desa Paluh Manan ini masih belum bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap kemajuan desa, sehingga pemerintah desa harus dapat bekerja keras dan dapat mengajak masyarakat untuk bekerjasama membangun desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan focus grup discussion dan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat dilihat keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam membangun desa. Sedangkan, di masa ini telah adanya program dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana desa.

Salah satu hasil yang diperoleh dalam model pemberdayaan masyarakat pesisir ini adalah terbentuknya perkumpulan masyarakat kreatif yang disingkat dengan PMK, kemudian perkumpulan ini di sahkan menjadi badan hukum dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, diharapkan perkumpulan ini dapat menjadi panutan atau contoh dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di segala aspek kehidupan.

Penulis sangat berharap adanya saran dan kontribusi untuk menyempurnakan buku ini menjadi lebih baik lagi dan akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat dan pemerintah desa. Terima Kasih.

Medan, Oktober 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PROFIL DESA PALUH MANAN.....	17
BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT.....	29
BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR.....	45
BAB V PEMBENTUKAN PERKUMPULAN MASYARAKAT KREATIF.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I PENDAHULUAN



Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik telah membawa perubahan dalam tata hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih demokratis. Salah satu dampak yang disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan tersebut yaitu terjadinya pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah. Dampak tersebut juga menjadi salah satu alasan untuk mendukung dan melaksanakan pengelolaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pergeseran paradigma otonomi daerah juga telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermula kepada asas *government* (kekuasaan sepenuhnya ada pada negara), kemudian bergeser menjadi asas *governance* (melibatkan semua aktor/pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan). Seiring dengan asas *governance* ini terjadinya perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat yang terus berkembang.

Perubahan-perubahan yang menjadi landasan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilandasi oleh nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Peningkatan kemampuan masyarakat ini menjadi salah satu tujuan utama pembangunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan desa tersebut, dilaksanakan satu program yang mendukung untuk pencapaian tujuan pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat desa.

Program ini dinilai tepat untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Secara umum, sasaran utama dalam program ini ditujukan pada pengembangan sumber daya manusia agar tercapai kualitas masyarakat yang maju dan mandiri. Gitosaputro dan Rangga (2015), bahwa usaha mengembangkan masyarakat merupakan salah satu proses untuk mengubah manusia dan lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik khususnya masyarakat pedesaan. Pengembangan sumberdaya (masyarakat) tidak hanya membutuhkan sumber daya fisik, namun perubahan tersebut akan terwujud apabila dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap memadai yang tergabung dalam suatu wadah (lembaga) tertentu.

Perubahan yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat akan berhadapan dengan sejumlah tantangan sehingga permasalahan perubahan tersebut tidak hanya terkait ketersediaan sumberdaya tetapi juga terkait pada kelompok-kelompok kepentingan yang berhadapan dengan kekuasaan. Perubahan pada masyarakat berimplikasi pada aspek ekonomi, aspek politik dan aspek sosial budaya. Perubahan yang dimaksud juga bukan hanya milik sebagian orang atau kelompok tertentu tetapi menjadi milik bersama yang didorong oleh semua pihak yang berkeinginan terciptanya tatanan baru yang lebih baik.

Setiap perubahan yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat terkait kepada keberhasilan pembangunan yang diprogram pemerintah sebagai wujud nyata terciptanya tatanan pemerintahan yang baik. Namun, keberhasilan program pembangunan selalu terkait dengan keterlibatan langsung masyarakat secara penuh dalam program atau kegiatan yang

diciptakan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat secara penuh tidak hanya dalam proses pengusulan dan memberi masukan akan tetapi juga mengawasi dan mengawal jalannya program atau kebijakan yang ditujukan pada kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan program dan kebijakan pembangunan juga lebih menonjolkan indikator ekonomi, karena dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Namun, dengan adanya keterpurukan perekonomian yang dialami oleh negara kita, berakibat pada tertutupnya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam berbagai proses politik dan lainnya. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan dedikasi penuh untuk mengontrol, mengawasi dan mengawal jalannya program pembangunan dan kebijakan yang sarannya adalah kepentingan masyarakat.

Permasalahan perekonomian yang dialami di Indonesia juga berimbas kepada tatanan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Maka, perubahan yang harus dilakukan dapat menciptakan restrukturisasi baik kinerja maupun visi dan misi yang mampu menghasilkan strategi perubahan yang lebih efektif sebagai suatu penguatan dalam pengembangan masyarakat. Tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dapat mendorong terselenggaranya perubahan yang berpihak bagi masyarakat secara penuh. Perubahan yang dilakukan juga harus didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang matang, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan dapat

memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap aspek kehidupan.

Pada masa ini, pemerintah sekarang sedang mengimplementasikan alokasi dana desa melalui program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian masyarakat yang diharapkan dapat berimbas kepada kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 – 2018, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Paluh Manan Kabupaten Deli Serdang, melalui beberapa tahapan telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pengalokasian dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa Paluh Manan.

Program alokasi dana desa ini sangat bermanfaat bagi pembangunan pedesaan yang dilakukan sebagai mewujudkan pemerataan pembangunan. Maka, manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui pengalokasian dana desa ini, sebagai wujud untuk memenuhi unsur-unsur khusus yang ada dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik sehingga dalam program pembangunan tersebut harus mengandung tiga tujuan, seperti yang dikemukakan oleh Todaro (1995), yaitu 1) Untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyediaan barang-barang kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan dan perlindungan keamanan bagi semua anggota masyarakat; 2) Untuk meningkatkan taraf kehidupan yang meliputi selain pendapatan yang lebih tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sarana pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan material semata-mata melainkan juga untuk menciptakan martabat atau harga diri yang lebih besar diantara masing-masing pribadi dan bangsa yang

bersangkutan sebagai keseluruhan; 3) Untuk memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masing-masing pribadi maupun negara atau bangsa yang bersangkutan melalui suatu usaha untuk memerdekakan diri dari perbudakan dan ketergantungan pihak lain, tidak dalam hubungannya dengan negara lain tetapi juga dalam kaitannya dengan kebodohan dan kepaanan manusiawi yang membelenggu kehidupan mereka.

Pembangunan secara global merupakan konsep yang sangat identik dengan tingkat laju pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat. Disamping itu, pembangunan juga setara dengan semakin majunya peradaban manusia. Afifuddin (2010), berpendapat bahwa banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar dan sebagainya, padahal arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu, Todaro (1995) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensi yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolute. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Konsep ini memberikan beberapa implikasi bahwa; a) Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan, b) Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti peningkatan (*Life Sustenance*: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, *Self-Esteem*: kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak diisap orang lain dan *Freedom From Servitude*: kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain). Pembangunan dikatakan sebagai sebuah konsep normatif dan proses multidimensi yang menuju ke arah perubahan sosial secara komprehensif maupun inkremental. Pembangunan yang normatif dimaksudkan bahwa di dalam gerak laju/kegiatan pembangunan itu harus diambil keputusan, guna pelaksanaannya sesuai dengan kondisi hakiki dari pada kebutuhan masyarakat secara umum atau seluruh kepentingan masyarakat, dan oleh karenanya pembangunan itu menyangkut kepada peningkatan kualitas hidup manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok. Masyarakat sebagai kumpulan individu-individu yang memiliki potensi sosial, dan menciptakan karya yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan dan perkembangan tersebut merupakan hasil ekspresi dan akal budi manusia dalam berinteraksi sesama manusia, inilah yang disebut dengan proses pembangunan.

Secara umum, ciri utama dari pembangunan adalah perubahan, perbaikan, peningkatan dan pertumbuhan yang wujud nyatanya tergantung kepada kondisi masyarakat yang membangun dan berkembang. Berdasarkan perkembangannya, maka penekanan pembangunan terhadap aspek ekonomi, pemenuhan kebutuhan material dengan meningkatkan kapasitas suatu

bangsa. Namun, secara idealnya bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak terutama antara pemerintah dan rakyat. Bryant dan White (1982) menjelaskan tentang manfaat pembangunan, yaitu:

1. *Capicity*. Pembangunan seharusnya dapat menumbuhkan kapasitas manusia baik secara individual maupun secara organisatoris, sehingga dengan kemampuan tersebut manusia dapat mencapai kualitas hidup secara efektif dan efisien.
2. *Equity*. Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai pemerataan distribusi sumberdaya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adil. Dengan pemerataan dan keadilan distribusi sumberdaya inilah kesejahteraan yang dapat tercapai oleh masyarakat.
3. *Empowerment*. Pembangunan adalah memberdayakan masyarakat secara individual dan secara kelompok untuk dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya untuk perubahan hidup yang lebih baik.
4. *Sustainability*. Pembangunan merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan.
5. *Symbiosis mutualis and interdependensi*. Pembangunan adalah suatu proses kerjasama yang saling menguntungkan, dan semaksimal mungkin tidak menciptakan saling ketergantungan antara sesama.

Pendapat Bryant and White tersebut, menyimpulkan bahwa pembangunan sebagai salah satu paradigma dan teori perubahan sosial yang mengalami kegagalan dalam penerapan di berbagai negara-negara dunia ketiga. Kemudian, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2006) berpendapat bahwa penyelenggaraan pembangunan muncul (utamanya negara-negara dunia ketiga) karena kita lebih banyak memahami pembangunan sebagai sebuah

fenomena politik dan historis daripada fenomena manajemen. Dengan kata lain, keduanya menyebutkan bahwa pembangunan lebih menawan dipahami dan dilaksanakan sebagai sebuah praktek politik apabila dibandingkan dengan praktek manajemen. Akhirnya, pemahaman inilah yang banyak berkembang dan dianut oleh negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan di negara-negara dunia ketiga disebut sebagai *development of the underdevelopment* seperti yang diungkapkan oleh Andre Gunder Frank (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2006), yang dibangun adalah keterbelakangannya.

Tujuan pembangunan, identik dengan pertumbuhan dan perubahan, seharusnya pertumbuhan hanya sebagai indikator pembangunan bukan tujuan, sedangkan tujuan pembangunan itu adalah peningkatan kualitas hidup manusia melalui berbagai aspek kehidupan. Budairi (2002), menyebutkan beberapa indikator dalam pembangunan adalah partisipasi (*participation*), keadilan sosial (*social justice/less inequality*), kesempatan kerja untuk semua (*work for all*), dan kemandirian (*autonomy*). Sedangkan Todaro (1995) juga menjelaskan bahwa dalam praktek pembangunan harus didasarkan pada tiga nilai dasar sebagai basisnya, yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*). Dengan demikian, konsep yang dijelaskan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi dua hal yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia dan pembangunan harus respek terhadap kemanusiaan.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka Budiman (2000) mengatakan bahwa pembangunan suatu negara mengandung dua sifat, yaitu sifat materialis dan non materialis. Sifat materialis mengutamakan pembangunan yang bersifat fisik, sedangkan non materialis adalah pembangunan yang

memberi rasa aman, tentram, senang dan bebas dari rasa takut. Namun, dalam prakteknya konsep pembangunan lebih banyak mengedepankan aspek materialis dan non material. Maka, ukuran keberhasilan suatu pembangunan selalu dimaknai sebagai suatu proses menuju kemajuan material perekonomian yang dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan domestik bruto (PDB).

Leftwich (2000), mengungkapkan bahwa pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis, dan pembangunan eksploitasi sumber daya alam, pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi dan (kadang kala) sosial, dan politik yang direncanakan, pembangunan juga sebagai kondisi, pembangunan sebagai suatu proses, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sebagai perubahan struktural, pembangunan sebagai modernisasi dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi. Selanjutnya, Hajar dan Tanjung (2016) menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi yang lain, dan dipandang lebih baik dan berharga. Pembangunan dapat dimaknai sebagai proses yang multidimensi yang terkait dengan berbagai perubahan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Rahim (Schramm dan Lerner, 1976) mengungkapkan bahwa di dalam setiap proses pembangunan terdapat dua kelompok atau sub sistem pelaku-pelaku pembangunan yang terdiri atas:

1. Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga, dll), pelaksanaan

kegiatan, pemantauan, dan pengawasan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Mardikanto dan Soebiato (2012), menjelaskan bahwa sub sistem “pemerintah dan penggerak” adalah semua aparat pemerintahan, penyuluh (change agent), pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM/LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk:

1. Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan.
2. Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.
3. Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat
4. Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
5. Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Sedangkan sub sistem masyarakat atau pengikut yang dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebiato (2012) adalah sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub sistem pemerintah/penggerak, yang berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.

2. Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
4. Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Mardikanto dan Soebiato (2012), bahwa terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian dari kedua sub sistem pelaku-pelaku pembangunan:

1. Aparat pemerintah/penguasa, di dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan harus senantiasa mau mendengarkan, memahami dan menghayati aspirasi masyarakat, memahami kondisi dan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakat. Lukman Sutrisno dan Dove (Mardikanto dan Soebiato, 2012), terdapat tiga hal yang harus selalu diingat, yaitu:
 - a. Adanya keterlibatan anggota-anggota masyarakat untuk memberitahukan kepada penguasa tentang apa dan bagaimana dengan sebaik-baiknya pembangunan yang direncanakan harus mampu menolong mereka, dan sebaliknya, penguasa tidak boleh hanya percaya terhadap hasil-hasil konsultasi antar jenjang birokrasi pemerintah.
 - b. Adanya hak tawar menawar yang dimiliki oleh sub sistem pengikut (masyarakat). Artinya, masyarakat harus diberi kesempatan untuk bila perlu menolak kebijakan atau program-program dan proyek

pembangunan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, atau kegiatan pembangunan yang akan terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat tanpa imbalan manfaat yang layak dapat dinikmati oleh masyarakat yang akan diwajibkan untuk memberikan pengorbanan tersebut.

- c. Setiap perencanaan harus selalu merupakan proses belajar yaitu perlunya ada keinginan para perumus kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk belajar dari pengalaman masyarakat dan menggunakannya sebagai acuan sebelum pengambilan keputusan.
2. Masyarakat harus selalu diberitahu tentang apa yang sedang dan telah direncanakan oleh penguasa, serta diberitahu cara-cara yang telah dipilih untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan itu. Untuk selanjutnya, masyarakat harus aktif mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan tersebut.
3. Masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya (pengetahuan, sikap, keterampilan) dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan di dalam setiap kegiatan pembangunan, sejak pengambilan keputusan perencanaan pembangunan hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Buku ini merupakan hasil penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 tentang Penerapan Pendekatan Partisipatoris Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini juga sebagai lanjutan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2012), bahwa minimnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Paluh Manan sehingga mempengaruhi pola

pikir masyarakat dalam mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah antara lain dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Paluh Manan. Hasil penelitian tersebut juga dikembangkan Hajar dan Tanjung (2013), dengan membentuk kelompok perempuan kreatif untuk merubah pola kehidupan masyarakat di desa tersebut. Namun, hasilnya tetap sama yaitu minimnya partisipasi masyarakat desa tersebut yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan rendahnya pola pikir masyarakat, sehingga pengembangan pembangunan partisipatif melalui model kelompok perempuan kreatif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Theresia, et al (2014), tidak tepatnya dalam memilih strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakatnya telah menghasilkan tragedi-tragedi pembangunan pada negara berkembang seperti di Indonesia, yaitu

1. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*)
2. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara sedang berkembang terhadap negara maju
3. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) periphery terhadap center
4. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat terhadap negara/pemerintah.
5. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan dll) terhadap pemilik modal.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Pembangunan yang Berorientasi pada Produksi dan yang berpusat pada Rakyat

Dimensi-dimensi	Pembangunan Berpusatkan pada Produksi	Pembangunan Berpusatkan pada Rakyat
Logika	Ekonomi – Produksi: eksploitasi dan manipulasi sumber daya alam	- Ekologi manusia - Pemanfaatan sumber daya informasi dan prakasa kreatif
Tujuan	Maksimalisasi arus barang dan jasa	- Peningkatan potensi manusiawi (individu sebagai aktor) - Pencapaian tujuan dengan memperimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal
Sistem Ekonomi	Konvensional: - Skala besar - Spesialisasi - Investasi - Keunggulan komparatif - Interdependensi global	Swadaya: - Logika tempat - Rakyat - Sumber daya - (sistem ekologi manusia)
Birokrasi	Birokrasi besar masyarakat diorganisasikan dalam satuan produksi yang efisien dengan pengawasan berpusat	Sistem swa-organisasi yang ada di sekitar satuan-satuan organisasi manusia dan berskala komunitas
Kriteria	- Efisiensi - Maksimalkan laju kenaikan produktivitas sistem	- Nilai produk - Partisipasi - Mutu kehidupan kerja
Teknik Sosial	- Bentuk organisasi sistem komando - Metode analisis keputusan bebas nilai dan positivis tik - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif fungsional - Sistem produksi didefinisikan secara fungsional - Perangkat analisis tidak mempertimbangkan manusia dan lingkungan	- Bentuk organisasi swadaya - Peran individu dalam proses pembuatan keputusan dengan nilai manusiawi sebagai ukuran - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif teritorial - Pilihan-pilihan produksi dan prestasi didasarkan pada kerangka ekologi, yaitu melibatkan manusia dan menempatkan manusia sebagai proses analisis
Proses pembuatan keputusan	- Sentralisasi - Didominasi para ahli - Tidak konsultatif - Kendali pejabat yang tidak menanggung akibat keputusan	- Memberi rakyat kapasitas hak memasukkan nilai-nilai kebutuhan lokal dalam proses pembuatan keputusan - Kendali pada rakyat yang hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu

Teknologi Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Diarahkan pada kebutuhan sistem komando - Menekankan aturan main hukum - Wewenang pengawasan pada struktur formal 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem belajar swa organisasi - Struktur formal itu dilengkapi dengan berbagai teknologi organisasi yang kurang formal dan cepat adaptasi diri. - Jaringan informasi yang dibangun di sekeliling arus manusia, nilai dan informasi sebagai tanggapan terhadap kepentingan dan kebutuhan khusus sesuai dengan keadaan kelompok-kelompok sosial yang lebih permanen, seperti keluarga, RT, organisasi sukarela, dsb.
-----------------------------	---	--

Sumber: Korten, 1987

BAB II PROFIL DESA PALUH MANAN



Desa Paluh Manan terletak di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dan berada di kawasan pesisir pantai Belawan. Desa Paluh Manan terletak di atas permukaan laut (0,8 s/d 2 m) sebagai daerah pesisir pantai, dan desa ini diklasifikasi sebagai Desa Swakarya. Secara Administratif daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Desa Paluh Kurau dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Datar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lama dan Selat Malaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Malaka

Lokasi penelitian ini mempunyai 9 dusun dengan luas \pm 18,93 Km² serta jumlah penduduk 3209 jiwa dengan kepadatan penduduk 177 jiwa/km². Penduduk desa Paluh Manan tergolong masyarakat miskin, dimana \pm 70% adalah masyarakat miskin yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Jumlah penduduk Desa Paluh Manan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yakni 1619 jiwa dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu 1590 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga di Desa Paluh Manan sebanyak 1044 KK.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Paluh Manan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1192	37,14 %
2.	SMP	249	7,76 %
3.	SMA	189	5,9 %
4.	Perguruan Tinggi	35	1,1 %
5.	Tidak Tamat	1544	48,1 %
6.	Jumlah	3209	

Sumber: Kantor P dan K Kecamatan Hamparan Perak, Tahun 2016

Catatan:

SD: Sekolah Dasar; SMP: Sekolah Menengah Pertama; SMA: Sekolah Menengah Umum; PT: Perguruan Tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Paluh Manan adalah tergolong rendah.

Jumlah Penduduk yaitu 48,1 %, namun angka ini juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat pendidikan bila dibandingkan di tahun 2014 yaitu 52,2%. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya masalah sosial di lingkungan masyarakat, misalnya pergaulan bebas. Namun, pendidikan yang rendah juga didukung oleh sarana pendidikan yang ada di Desa Paluh Manan, dimana sarana pendidikan tersebut bisa dikategorikan tidak layak karena apabila air pasang dan hujan deras, fasilitas pendidikan tidak dapat digunakan oleh masyarakat setempat.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No.	Suku	Jumlah	Persentase
1.	Jawa	321	10 %
2.	Melayu	81	2,52 %
3.	Batak	309	9,62 %
4.	Mandailing	61	1,9 %
5.	Banjar	2278	71 %
6.	Aceh	16	0.48 %
7.	Lainnya	143	4,45 %
	Jumlah	3209	

Sumber : Desa Paluh Manan Dalam Angka Tahun 2016

Melalui data ini dapat diketahui bahwa 71 % penduduk Desa Paluh Manan adalah suku Banjar. Desa Paluh Manan ini juga merupakan desa heterogen yang memiliki keaneka ragaman suku dan adat istiadat, misalnya di Desa Paluh Manan juga terdapat penduduk yang bersuku Jawa, Batak dan lain-lain. Suku selain suku banjar adalah suku pendatang dan menetap yang ada di Desa Paluh Manan. Desa Paluh Manan adalah salah satu desa yang tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah, apabila dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di lingkungan Kecamatan hamparan Perak. Secara umum,

penduduk masyarakat Desa Paluh Manan ini mayoritas adalah suku banjar dan beragama Islam, sesuai dengan Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama

No.	Dusun	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1.	I	430	-	-	-	-	430
2.	II	300	10	4	-	-	314
3.	III	383	-	-	-	-	383
4.	IV	361	-	-	-	-	361
5.	V	460	-	-	-	-	460
6.	VI	335	-	-	-	-	335
7.	VII	290	3	-	-	-	293
8.	VIII	231	68	13	-	-	311
9.	IX	132	165	25	-	-	322
Jumlah Total							3209

Sumber: Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2016

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat desa ini adalah masyarakat pra sejahtera dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Hal ini adalah juga termasuk faktor utama dari munculnya permasalahan sosial yang terjadi di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak.



Gambar 1. Kondisi Sarana Pendidikan Di Desa Paluh Manan

Dusun ini, adalah dusun terpencil yang ada di Desa Paluh Manan, dimana keadaan dusun ini dikelilingi oleh batas pantai sehingga menuju dusun ini harus menyeberang atau memakai transportasi sungai atau laut berupa sampan atau boat. Transportasi ke dusun ini, sering dijumpai di tangkahan desa sekali menyeberang dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,-.



Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Gambar 2. Tangkahan Dusun IX Sebagai Tempat Penantian Boat Oleh Masyarakat

Desa Paluh Manan dikategorikan desa pesisir pantai karena letak desanya antara 0,8 s/d 2 m di atas permukaan laut. Mayoritas masyarakat desa ini bermata pencaharian bertani dan nelayan. Sesuai dengan data yang diperoleh luas desa menurut tata ruang dan penggunaannya adalah:

Lahan Pertanian	: 903 Ha
Lahan Perkebunan	: 523 Ha
Lahan Pertambakan	: 128 Ha
Lahan Darat/Perumahan	: 410 Ha
Lahan D.A.S/DII	: 50 Ha

Potensi desa yang dimiliki oleh Desa Paluh Manan sebenarnya cukup untuk mengembangkan desa, namun desa ini tidak didukung oleh sumber daya yang memadai yaitu kemampuan masyarakat. Tidak hanya itu, keluhan yang dialami masyarakat juga terkait dengan banyaknya lahan yang sudah dimiliki oleh orang luar desa yang tidak berdomisili di desa ini. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi bahwa adanya limbah dari hasil pertambakan dan pertanian yang membuat kerugian bagi masyarakat sekitar, contohnya: limbah tambak yang tidak dapat didaur ulang kembali sehingga mengakibatkan aroma yang tidak enak di sekitar lahan pertambakan tersebut.

Ketidaknyamanan ini juga dibenarkan oleh pihak pengelola pertambakan tersebut karena kurangnya keahlian mereka dalam mengelola ulang limbah. Kondisi ini akhirnya berkembang menjadi masalah lingkungan, yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintahan desa dan masyarakat. Masalah lingkungan dapat mengurangi potensi desa untuk berkembang, maka perlunya respons lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Zubaedi (2014) bahwa terdapat dua karakteristik dalam merespons masalah lingkungan yaitu:

- a. Memecahkan masalah spesifik dengan solusi terpisah dan spesifik pula. Misalnya, problem kerusakan sumber daya alam dipecahkan dengan teknologi alternatif, problem polusi dipecahkan dengan teknologi anti polusi dan lain-lain. Setiap problem diisolasi dari problem lain, lalu dicarikan pemecahannya.
- b. Mencari solusi dalam tatanan sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlangsung. Mereka tidak memandang penting untuk mengubah semua sistem tersebut.

Potensi desa di Desa Paluh Manan dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil survey yang dilakukan. Adapun hasil survey yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Sumber-sumber daya alam yang ada di Desa Paluh Manan

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1.	Pertanian	98	30,53
2.	Perkebunan	81	25,23
3.	Perikanan/Pertambakan	101	31,47
4.	Lain-lain	41	12,77
	Jumlah	321	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan adanya keragaman potensi desa yang dapat dikembangkan sesuai dengan pilihan dan kemampuan masyarakat. Potensi desa yang paling banyak di Desa Paluh Manan adalah di bidang perikanan/pertambakan dan pertanian. Hal ini sesuai dengan tingkat mata pencaharian masyarakat yaitu nelayan dan bertani. Mata pencaharian ini adalah pekerjaan yang dominan dilakukan oleh masyarakat desa.

Tabel 6. Kondisi sumber daya alam

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Bagus	142	44,23
2.	Tidak Bagus	179	55,77
	Jumlah	321	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terkelola dengan baiknya potensi desa tersebut, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan memberdayakan hasil dari potensi desa yang ada. Banyaknya kondisi alam yang harus mendapatkan perhatian khusus terkait pemberdayaan. Salah satu contoh yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat

nelayan yaitu mereka tidak dapat mengolah limbah hasil dari pertambangan mereka.

Tabel 7. Peran kepala desa dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Bagus	161	50,15
2.	Tidak Bagus	160	49,85
	Jumlah	321	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Peran kepala desa sebenarnya sudah bagus, hanya saja belum dapat memaksimalkan dalam memberdayakan potensi desa dan kemampuan masyarakat desanya.

Potensi desa yang ada seharusnya diberi kekuatan baik secara moril dan materil, salah satu yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan anggaran dana desa dengan melakukan kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat melalui pengembangan potensi desa sehingga dapat memicu semangat masyarakat dalam beraktivitas dan memunculkan kreativitas-kreativitas baru. Melalui pengembangan potensi desa dengan pemakaian dana desa sebenarnya itu adalah suatu yang sangat wajib dilakukan oleh setiap desa karena tujuan utama dari pemberian dana tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat.

Upaya yang dilakukan juga dapat dengan menerbitkan peraturan desa tentang pengembangan potensi desa dan melegalkan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah pengembangan hasil potensi desa.

Tabel 8. Peran tokoh masyarakat (pemuda, agama, pendidikan dan lainnya) dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Bagus	159	49,53
2.	Tidak Bagus	162	50,47
	Jumlah	321	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Pelestarian dan pengelolaan sumber daya yang akhirnya menjadi potensi suatu daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan sehingga dibutuhkan keterlibatan semua pihak.

Salah satu pihak yang diharapkan dalam terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan dengan program pemberdayaan masyarakat adalah para tokoh masyarakat.

Keterlibatan tokoh masyarakat di Desa Paluh Manan merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat.

Tabel 9. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Pendidikan	47	14,64
2.	Ekonomi	53	16,51
3.	Kesehatan	36	11,21
4.	Pembangunan	185	57,64
	Jumlah	321	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini ada di Desa Paluh Manan ± 57,64% adalah program pembangunan. Sesuai hasil wawancara dengan

salah seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Sofian, bahwa kegiatan pembangunan yang diselenggarakan dengan pembiayaan dana desa, lebih dimaksimalkan kepada pembangunan fisik daripada pembangunan manusianya.

Tabel 10. Program pemberdayaan masyarakat yang sering diikuti dan terlibat langsung

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Pendidikan	47	14,64
2.	Ekonomi	53	16,51
3.	Kesehatan	36	11,21
4.	Pembangunan	185	57,64
	Jumlah	321	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Program pembangunan adalah kegiatan yang sering diikuti oleh masyarakat desa, misalnya dalam kegiatan pembangunan irigasi dan waduk air bersih. Kegiatan ini dilakukan dengan anggaran dana desa yang diberikan kepada desa. Selanjutnya, pemberdayaan yang dilakukan juga terkait dengan penghijauan dan perbaikan jalan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa pesisir harus adanya perhatian ekstra. Salah satunya adalah kemampuan dan tenaga ahli yang ada di Pemerintahan Desa sehingga dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kemampuan aparat desa di Pemerintahan Desa Paluh Manan masih tergolong minim dan tidak dapat mendukung kegiatan yang dilaksanakan sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang dapat memberikan solusi dan pengetahuan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Paluh Manan belum memberikan manfaat yang maksimal. Namun, manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat desa adalah pembangunan fisik (perbaikan jalan, waduk air bersih), namun untuk hal peningkatan pengetahuan dan kemampuan belum ada manfaatnya. Keinginan terbesar yang diharapkan oleh masyarakat desa adalah peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang pendidikan.

Dibalik potensi yang dimiliki oleh Desa Paluh Manan, terdapat juga masalah dalam mengembangkan potensi desa tersebut. Terdapat beberapa potensi desa yang dimiliki oleh desa ini, yaitu potensi pertanian, potensi dari lahan tambak dan kekayaan alam laut yang dapat diolah menjadi bahan olahan makanan seperti udang, kepiting dan ikan.

Potensi yang dimiliki Desa Paluh Manan ini mencerminkan mayoritas pencaharian masyarakatnya yaitu nelayan dan petani. Namun, sebagian dari masyarakat tersebut tidaklah mempunyai keahlian yang dapat mendukung hasil kerja mereka. Para nelayan di Desa Paluh Manan ini \pm 65% tidak mempunyai identitas dan tidak dapat membaca. Begitu juga dengan para petaninya, sehingga menjadi permasalahan yang mendasar untuk mengembangkan kreativitas dan kemajuan desa ini.

Di bidang pertanian juga demikian, masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak dapat melakukan pengelolaan sumber dari lahan pertanian karena rendahnya kemampuan dalam melakukan produktivitas hasil lahan mereka. Pembudi daya ikan, udang dan kepiting juga dikategorikan sebagai petani. Dalam hal membudi dayakan hasil produksi juga relatif rendah sehingga dibutuhkan pengawasan dan kontrol yang permanen sehingga dapat menghasilkan hasil yang produktif seperti benih dan makanan.

Petani tambak dan nelayan sangatlah jauh berbeda karakteristiknya dalam mengolah dan membudi dayakan potensi yang ada. Nelayan bersifat *open access* yang mencari hasil dengan berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan resiko pekerjaan nelayan juga cukup tinggi. Nelayan memiliki karakter yang keras, tegas dan terbuka.

Pekerjaan masyarakat di Desa Paluh Manan, setiap orang dapat merangkap menjadi nelayan dan petani. Pekerjaan mereka tergantung kondisi alam dan ekosistem yang mendukung. Firth (dalam Zubaedi: 2014) mengatakan masyarakat nelayan memiliki kemiripan dengan masyarakat tani, yakni bahwa sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana; eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerja sama; sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsistem; dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT



Photo by rawpixel.com from Pexels, CCBY0

Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di setiap program kebijakan pemerintah melalui melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Wazir (1999) mengemukakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan Isbandi (2007) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999) mengemukakan bahwa partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Maka, dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department For International Development* (DFID) (Seumampow, 2004) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (Hajar, 2012) sebagai berikut: pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek-proyek tersebut. Ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Theresia. et. al (2014), terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksana Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat

untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Kemudian Dusseldorp (1981), mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Selanjutnya, Bass et al (Hobley, 1996), mengidentifikasi adanya tujuh tipe partisipasi, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Tabel 11. Tipe Partisipasi

No.	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
1	Partisipasi Pasif/Manipulatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi - Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat - Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran
2	Partisipasi Informatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian - Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian - Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat
3	Partisipasi Konsultatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi - Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. - Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama - Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan - Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti
4	Partisipasi Insentif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah - Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau

No.	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
		eksperimen-eksperimen yang dilakukan
5	Partisipasi Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan - Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek - Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati - Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya
6	Partisipasi Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan - Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis - Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan
7	Self Mobilization (Mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki - Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan –bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan - Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan

Sumber: Hogley, 1996

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan atau evaluasi. Muluk (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerima manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat ini, maka akan menjadikan masyarakat dan pemerintah yang merupakan mitra kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Abe (2005), melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak, yaitu 1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki

rakyat; 2) Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; 3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Mendukung pernyataan Abe tersebut, Dorojatun (Deviyanti, 2013) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi merupakan suatu ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu 1) Kemauan; 2) Kemampuan; dan 3) Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Faktor pendukung masyarakat dalam berpartisipasi di dalam suatu program pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Abe di atas, dapat dilihat dari bentuk kemauan masyarakat melalui sikapnya yang ingin selalu memperbaiki mutu kehidupannya. Theresia (2014) mengemukakan bahwa sikap masyarakat yang hadir dalam setiap kegiatan atau program pembangunan, serta memberikan gagasan pemikiran mereka terhadap kemajuan untuk keberhasilan pembangunan. Walaupun, sikap yang diperlihatkan masyarakat itu tidak menghambat pembangunan dan adanya keinginan untuk meningkatkan mutu kehidupan mereka akan tetapi kalau pemerintah tidak mengakomodir usulan dan gagasan masyarakat, maka kemauan dan keinginan masyarakat tersebut dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan partisipasi dalam proses pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasinya.

Namun, Solekhan (2014) mengemukakan bahwa kegagalan pembangunan dalam menuntaskan permasalahan sosial di masyarakat dikarenakan tidak hanya adanya partisipasi dari masyarakat, dan kenyataan tersebut

menjadikan pertimbangan bahwa partisipasi hendaknya ditumbuhkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi suatu hal penting dalam keberhasilan pembangunan khususnya program pemberdayaan masyarakat. Arif (2012), bahwa terbukanya kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat maka akan menjadi lebih membuat masyarakat memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi lingkungannya dan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat berkontribusi untuk ikut mengatasinya.

Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah khususnya pemerintahan desa dapat memberikan perubahan untuk kemajuan pembangunan desa. Pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah melalui implementasi dana desa, sangat membutuhkan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat seperti pemikiran-pemikiran dan ide atau gagasan untuk kemajuan desa. Wasistiono (Hardinata, 2010) mengemukakan bahwa terdapat syarat utama masyarakat untuk berpartisipasi dalam konteks kepentingan negara dan pemerintahan yaitu 1) Ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan); 2) Ada keterlibatan secara emosional, dan 3) Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Selanjutnya, Eko (2003) juga menjelaskan bahwa secara substantif partisipasi mencakup 3 (tiga) hal yaitu pertama, Voice (suara) yakni setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Kedua, akses yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. Ketiga, kontrol yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (control)

terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Pendekatan partisipatoris merupakan pendekatan berbasis komunitas (*Community Based Approach*), yang menilai tinggi partisipasi masyarakat dalam proses-proses perumusan masalah dan penyusunan perencanaan, dengan orang luar sebagai fasilitator sehingga pandangan dari dalam masyarakat sendiri merupakan pendekatan utama. Kristanto (1997), mengemukakan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan perencanaan yang berorientasi dari bawah ke atas (*bottom-up strategy*). Sedangkan Riyadi dan Bratakusumah (2005), mengatakan bahwa pendekatan partisipatoris dilakukan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dimaksudkan sebagai metode belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa sendiri serta bertujuan menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat.

Metode PRA dilakukan tidak sekedar proses memahami, melainkan analisis, perencanaan dan tindakan sehingga pendekatan yang dilakukan dapat memungkinkan masyarakat desa khususnya masyarakat pinggiran pantai untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan masyarakat tentang kondisi dan kehidupan desa serta membuat rencana dan bertindak. Pendekatan partisipatoris melalui *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menekankan bahwa masyarakat sasaran memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol bahkan mengubah program yang telah dikeluarkan oleh perencana pembangunan.

Ada beberapa prinsip dalam *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya yang dikemukakan oleh Muslim, (2007), yaitu a)

Belajar secara langsung. Belajar dari masyarakat secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan fisik, teknis, dan sosial secara lokal, b) Belajar secara cepat dan progresif. Belajar secara cepat dan progresif melalui eksplorasi yang terencana dan pemakaian metode yang fleksibel, c) Komunikasi rileks dan bersifat kekeluargaan. Menyeimbangkan bias, rileks dan tidak tergesa-gesa, mendengarkan dan bukan menggurui, tidak memaksakan dan mencari masyarakat yang lebih miskin, kehadiran orang luar hendaknya masuk dalam proses diskusi sebagai anggota. Oleh karena itu, komunikasi yang ada harus bersifat kekeluargaan, d) Optimalisasi pertukaran, mengaitkan biaya pemahaman dengan informasi yang benar-benar bermanfaat dengan pertukaran antara kuantitas, kegayutan, keakuran serta ketepatan waktu, e) Membuat jaringan titik-titik pengukuran, dapat diartikan sebagai penggunaan waktu kisan yang terdiri dari metode, diskusi, jenis informasi untuk pengecekan silang, f) Mencari keanekaragaman, mencari hal yang berbeda-beda daripada rata-rata. Dalam hal ini metode triangulasi dipergunakan untuk memperoleh informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, g) Pemberian fasilitas artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis penyajian dan pemahaman oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya serta juga mempelajarinya, h) Kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis, fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik. Kesalahan harus dipahami sebagai suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik, i) Saling berbagi informasi dan gagasan antar sesama masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator dan antar fasilitator yang berbeda, serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda.

Melibatkan masyarakat dalam setiap program pembangunan desa yang khususnya memberdayakan masyarakat desa. Asnudin (2009) program dengan pendekatan partisipatif untuk masa yang akan datang dibutuhkan beberapa kegiatan awal dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Analisis pembangunan partisipatif merupakan alat analisis pertama yang digunakan dalam metode lapangan untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pada tahap awal analisis ini diupayakan untuk mengetahui terlebih dahulu kelompok-kelompok sasaran pembangunan, institusi/lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun institusi masyarakat yang diperkirakan akan terlibat dan terkena dampak dari pembangunan tersebut.

Locmeier (Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2005), memberikan definisi analisis partisipatif ini sebagai suatu analisis mengenai masalah-masalah, kekhawatiran, kepentingan, harapan-harapan dari institusi-institusi, lembaga-lembaga pelaksana, proyek-proyek lain, dan individu-individu dari suatu proyek atau mereka yang mungkin dipengeruhinya. Metode yang digunakan dalam melaksanakan program pembangunan partisipatif yang melibatkan peran masyarakat secara langsung terdapat beberapa metode, yaitu:

- a. Metode ZOPP, yakni perencanaan proyek yang berorientasi kepada tujuan. ZOPP adalah singkatan dari kata-kata :
 - *Ziel* berarti tujuan
 - *Orientere* berarti berorientasi
 - *Project* berarti proyek
 - *Planning* berarti perencanaan

ZOPP ini digunakan untuk mengkaji keadaan desa dan mempunyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek.

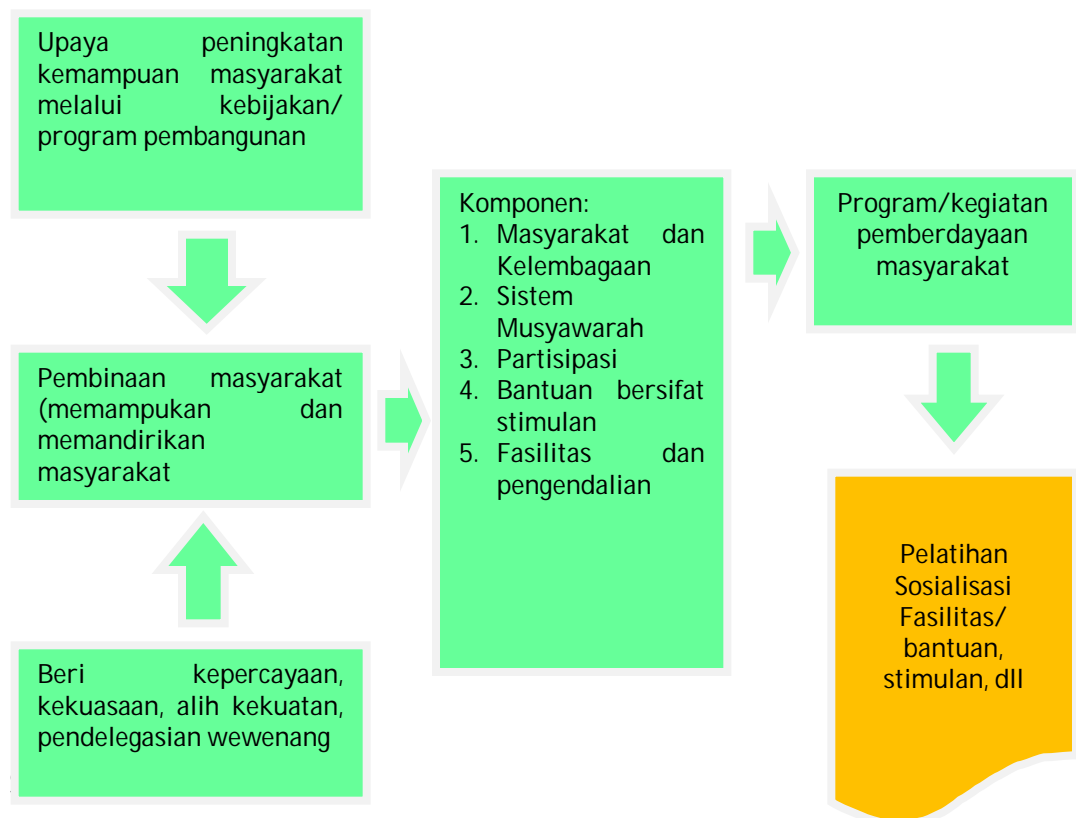
- b. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dimaksudkan sebagai metode belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa sendiri serta bertujuan menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat.
- c. Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) merupakan metode yang digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat.

Manfaat dari analisis partisipatif dalam suatu proses pembangunan partisipatif yaitu menghimpun semua kepentingan yang berbeda tersebut agar:

- a. Diperoleh gambaran mengenai keseluruhan pranata dan kelompok masyarakat yang dimungkinkan ikut berperan atau terpengaruh oleh dampak pembangunan di daerah tersebut.
- b. Diketahui kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tersebut, sehingga dapat dirumuskan dalam prioritas-prioritas pembangunan.
- c. Diketahui kekhawatiran dan konflik yang mungkin terjadi, berikut potensi dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap kelompok.
- d. Diketahui berbagai konsekuensi dan implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, sehingga memudahkan pengambilan langkah yang harus ditempuh. (Riyadi dan Bratakusumah, 2005)

Pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

pengawasan pembangunan. Arah dari pembangunan partisipatif yaitu terciptanya program pembangunan yang murni dari bawah (*bottom up*), dimana pemerintah harus merelakan sebagian kewenangannya sebagai pemegang monopoli pembangunan kepada masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta evaluasinya. Upaya untuk mencapainya, maka pembangunan partisipatif mempersiapkan masyarakat agar mereka dapat terlipat pada peran tersebut, tidak saja dari teknis juga dari segi pemahaman tentang kebijakan arah dan kebijakan pembangunan yang disepakati.



Gambar 3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan gambar 3, bahwa pentingnya partisipasi masyarakat sebagai 1) Upaya peningkatan kemampuan masyarakat melalui kebijakan/program

pembangunan; 2) Upaya pembinaan masyarakat (memampukan dan memandirikan masyarakat); 3) Upaya untuk memberikan kepercayaan, kekuasaan juga alih kekuatan serta untuk pendelegasian wewenang. Upaya-upaya ini untuk juga untuk mendukung komponen-komponen dalam pengembangan partisipasi masyarakat yaitu masyarakat dan kelembagaan, sistem musyawarah, partisipasi, bantuan bersifat stimulan serta fasilitas dan pengendalian. Semua komponen pengembangan partisipasi masyarakat tersebut, untuk mendukung tersusunnya program pemberdayaan masyarakat khususnya daerah pesisir yang kemudian dilakukan kegiatan pelatihan maupun sosialisasi sebagai upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan pada berbagai daerah di Indonesia terutama daerah pesisir, sangatlah membutuhkan program yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun, pembangunan yang dilaksanakan di setiap daerah tersebut selalu mendapatkan hambatan dalam melakukan programnya yaitu minimnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Soetrisno (1995) mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu

1. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.
 - a. Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh

- (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
- b. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedang yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - c. Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerja sama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub sistem yang disubordinasikan oleh supra sistem dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Masalah kedua adalah dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi seperti itu, dapat menimbulkan reaksi balik berupa “budaya diam” yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi karena dianggap asal beda atau waton suloyo.
 3. Masalah ketiga adalah, banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR



Photo by Ibrahim Asad from Pexels, CC BY 0

Negara dunia ketiga identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan yang selalu muncul dalam proses pembangunan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam kepemilikan atau akses pada sumber-sumber power, hal ini terjadi dikarenakan adanya *power dispowerment*. Theresia, et al (2014) menjelaskan bahwa *power dispowerment* yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power, dan selanjutnya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan.

Dengan penjelasan di atas, maka pemberdayaan bertujuan dua arah, yaitu pertama, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Secara terminologi, pemberdayaan itu dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya berarti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar.

Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa, sangat erat berkaitan dengan program yang disusun sendiri oleh masyarakat juga mampu untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat serta dapat menciptakan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Maka, dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan sebuah strategi yang dapat dikembangkan untuk mencerminkan paradigma baru pembangunan.

Pemberdayaan selalu dikaitkan dengan wacana pembangunan masyarakat dan dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Istilah pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model

pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Arsiyah, DKK (2009) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kartasasmita (1996), menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidak berdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Ife dalam Zubaedi (2014), mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.

- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- d. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
- e. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa adalah pengembangan yang dilakukan untuk masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupannya sendiri.

Berdasarkan pendapat Chambers (Kartasasmita, 1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, dimana konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu *people centered, participatory, empowering, and sustainable*. Sedangkan pendapat Prijono dan Pranarka (Theresia, et. al: 2014), bahwa lahirnya konsep pemberdayaan sebagai

antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas, dimana konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi.
- d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Kemudian Sanderson (Satria, 2015), menjelaskan bahwa dalam perubahan paradigma pembangunan terdapat tiga asumsi pokok yang terkait dalam konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Keterbelakangan cenderung dilihat sebagai suatu keadaan asli (original state), sebagai suatu keadaan masyarakat yang telah ada dalam aneka bentuknya. Keterbelakangan itu terjadi akibat belum masuknya kapitalisme, sehingga untuk keluar dari ketertinggalan, kapitalismelah jawabannya.
- b. Keterbelakangan merupakan akibat dari banyaknya kekurangan yang ada, di dalam suatu masyarakat seperti kekurangan kapital sehingga untuk mengatasinya diperlukan formasi kapital baru melalui difusi modal dan teknologi.
- c. Masyarakat terbelakang biasanya tidak mempunyai semacam kesadaran atau mentalitas yang menawarkan perkembangan. Kemajuan dikatakan terjadi bila orang yang telah mengadopsi

pemikiran rasional, nilai-nilai yang berorientasi masa depan, dan sistem etik. Sementara itu, umumnya nilai-nilai lokal masyarakat dianggap tidak kondusif bagi pencapaian kemajuan.

Theresia, et. al (2014) secara konseptual bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Memandirikan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Program pemberdayaan masyarakat bukan hanya untuk penguatan individu atau kelompok masyarakat, akan tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai budaya melalui penguatan pranata-pranata dalam lingkungan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama yang baik antara semua pihak, dimana anggota masyarakat menjadi pemeran utama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki (pengetahuan, keterampilan dan pengalaman) sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan sampai kepada pengawasan.

Hajar, et. al (2017), bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan yang berkaitan dengan mengembangkan kondisi dan situasi dari potensi yang memiliki daya dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Potensi desa terbagi dua yaitu sumber alam (fisik) dan sumber manusia (non fisik) yang dimiliki oleh suatu desa dan mempunyai manfaat bagi kelangsungan kehidupan di desa. Maksudin (2001), yang termasuk dalam potensi desa adalah:

1. Potensi Fisik, meliputi:

- a. Tanah, meliputi sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan makanan dan tempat tinggal.
- b. Air, meliputi sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, pertanian dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Iklim, peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris
- d. Ternak, sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan pendapatan
- e. Manusia, sebagai sumber tenaga kerja potensial (potential man power) baik pengolah tanah dan produsen dalam bidang pertanian, maupun tenaga kerja industri di Kota

2. Potensi Non Fisik, meliputi:

- a. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian
- b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat
- c. Aparatur atau peluang desa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran hanya pemerintahan desa.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui metode partisipatory rural appraisal (PRA) merupakan salah satu untuk melakukan pengembangan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan desa. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengembangan partisipasi masyarakat ini yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui kebijakan dan program pembangunan, pembinaan masyarakat (memampukan dan memandirikan masyarakat). Tahapan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan, sosialisasi, dan fasilitas/bantuan, stimulan dan lain-lain.

Locmeier (Riyadi dan Bratakusumah, 2005) berpendapat bahwa metode partisipatory rural appraisal (PRA) dimaksudkan sebagai metode belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa sendiri serta bertujuan menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi atau keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap kegiatan dan program pembangunan desa.

Pentingnya program pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga menghasilkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Dengan demikian, terbentuknya perkumpulan masyarakat kreatif di Desa Paluh Manan, menjadi bukti nyata adanya perubahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan metode PRA.

Pemberdayaan masyarakat desa pesisir di Desa Paluh Manan dikhususkan kepada pengembangan bidang pertanian dan pertambakan. Pengelolaan lahan pertanian dan pertambakan dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga meningkatkan kemampuan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan potensi desa.

Pembagian potensi dan keunggulan yang dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, kemudian diberikan alternatif-alternatif yang dapat mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa pesisir di Desa Paluh Manan. Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan di Desa Paluh Manan, dapat menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di daerah pesisir pantai.

Terkait dengan pembagian potensi dan keunggulan dalam pengembangan masyarakat desa pesisir, maka dalam penelitian ini dilakukan pembentukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kelompok masyarakat ini di rumuskan setelah adanya hasil survey, lalu disempurnakan dalam kegiatan *Focus Grup Discussion* (FGD).

Pembentukan model pemberdayaan masyarakat desa pesisir dilihat dari pengelompokan potensi dan keunggulan desa, maka model kelompok ini diberi nama model kelompok masyarakat kreatif (KMK) berdasarkan hasil keputusan bersama di dalam FGD. Kelompok Masyarakat Kreatif (KMK) yang dibentuk ini, bertujuan untuk memaksimalkan potensi dan keunggulan desa sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera.

Istilah daerah pesisir, merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan pinggiran pantai atau laut. Amanah (2010), menyatakan bahwa masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Secara teoritis masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya lautan sehingga mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap hasil laut. Sedangkan Mubyarto (2002) masyarakat pesisir, khususnya nelayan secara umum, dikategorikan lebih miskin daripada keluarga petani atau pengrajin. Kemiskinan ini dicirikan oleh pendapatan yang berfluktuasi, pengeluaran yang konsumtif, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, unit kelembagaan yang tersedia belum mendukung terjadinya pemerataan pendapatan, potensi tenaga kerja keluarga (istri dan anak) belum dapat dimanfaatkan dengan baik, serta akses terhadap permodalan rendah.

Masyarakat pesisir pada umumnya sekelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya kelautan sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor kelautan dan sisanya terdiri dari pedagang dan petani. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Kondisi fisik dari pemukiman dan kehidupan masyarakat pinggiran pantai terbagi dalam tiga kategori yaitu: rumah permanen (memenuhi syarat kesehatan), rumah semi permanen (cukup memenuhi syarat kesehatan), rumah non permanen (kurang atau tidak memenuhi syarat kesehatan).

Namun, secara umum kondisi pemukiman masyarakat pinggiran pantai lebih banyak kepada rumah non permanen. Terdapat beberapa karakteristik masyarakat pinggiran pantai yang dikemukakan oleh Wignyosoebroto (2009) yaitu:

- a. Sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan
- b. Sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar
- c. Struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama.
- d. Sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan.

Kemudian, Satria (2001) bahwa secara umum masyarakat pesisir tergolong kepada kehidupan nelayan yang dapat dibagi dalam penggolongan di bawah ini:

Tabel 12. Penggolongan nelayan berdasarkan karakteristik usaha

Jenis	Orientasi Ekonomi dan Pasar		Tingkat Teknologi	Hubungan Produksi
Usaha Tradisional	Subsistensi	Rumah Tangga	Rendah	Tidak Hirarki, Status Berdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Usaha Post-Tradisional	Subsistensim	surplus, rumah tangga, pasar domestik	Rendah	Tidak hirarki, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Usaha Komersial	Surplus, pasar domestik dan ekspor		Menengah	Hirarki, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen
Usaha Industrial	Surplus dan ekspor		Tinggi	Hirarki, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen

Sumber: Satria (2001)

Potensi dan keunggulan desa merupakan salah satu kunci yang harus dimiliki setiap desa khususnya desa pesisir pantai dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat dan desanya. Melalui potensi dan keunggulan ini, kita dapat mengelompokkan peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan dari desa sehingga dapat disusun kerangka kerja dalam pemberdayaan masyarakat. Pengelompokan ini dianalisis dengan analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), tantangan/ancaman (*threatment*).

Analisis SWOT ini dilakukan setelah adanya hasil survey yang dilakukan di lokasi penelitian juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan desa pada saat dilaksanakan *Focus Grup Discussion* (FGD) di Desa Paluh Manan.

Kekuatan (*Strength*)

1. Potensi sumber daya pertanian dan pertambakan yang besar.
2. Semangat hidup dan kerja yang besar untuk memperbaiki diri.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat teknologi.
2. Rendahnya semangat kewirausahaan dalam peningkatan kesejahteraan
3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Peluang (*Opportunity*)

1. Lokasi pertanian dan penangkapan ikan luas dan dekat dari tempat tinggal.
2. Upah tenaga kerja yang murah
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya yang cukup baik

Tantangan/Ancaman (*Treatment*)

1. Polusi air laut sehingga ekosistem laut juga rusak
2. Terdapatnya musim dalam pengolahan pertanian dan perikanan
3. Adanya harga pasar dalam bidang pertanian dan perikanan yang dikelola oleh agen

Proses pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dan juga program yang berkesinambungan, yang terkait dalam pengembangan kondisi dan situasi suatu daerah juga tentang masyarakat pesisir. Melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pembangunan juga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah pesisir. Program-program kemiskinan dibagi menjadi empat untuk mempertajam fokus pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a. Klaster 1, Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses pelayanan dasar antara lain melalui makanan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Klaster 2, Program Pemberdayaan Masyarakat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Klaster 3, Program-Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas usahanya agar kehidupan masyarakat miskin semakin stabil dan pendapatan meningkat.

- d. Klaster 4, Program Pro Rakyat yang dilaksanakan dengan tujuan melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan dan membantu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan termajinakan. (<http://www.setgab.go.id/indeks.php>)

Pentingnya program pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sangat dibutuhkan partisipasi dari semua pihak baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi yang dimaksud terkait dengan keterlibatan langsung dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Pemberdayaan masyarakat desa pesisir yang dilaksanakan di Desa Paluh Manan telah dibentuk suatu model yang diberi nama model Perkumpulan Masyarakat Kreatif (KMK). Pembentukan kelompok desa ini mendapat sambutan positif dari pihak masyarakat juga pemerintahan desa. Kelompok desa ini, juga merupakan model yang akan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan metode *participatory rural appraisal* (PRA).

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan yang dilakukan terhadap potensi dan keunggulan desa, khususnya program pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa di Desa Paluh Manan masih tergolong belum maksimal disebabkan oleh kemampuan aparatur yang belum memadai untuk memberikan arahan dan wawasan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang sangat menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Paluh Manan, salah satunya

adalah rendahnya tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga kegiatan yang telah dicanangkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Tidak hanya peran pemerintah, namun juga perlu keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap kegiatan yang bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tidak optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Paluh Manan juga disebabkan oleh kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat yang berasal dari potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh desa. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan karena adanya tuntutan masyarakat yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, politik dan budaya sejalan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, pentingnya peran pemerintah dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah pesisir pantai. Desa Paluh Manan, merupakan salah satu desa yang berpotensi dapat dikembangkan baik dari masyarakat maupun keunggulan yang dimiliki desa. Namun, dalam proses pengembangannya terdapat banyak hambatan dan kendala yang harus diselesaikan yaitu permasalahan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan masyarakat juga kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa yang masih tergolong rendah.

BAB V PEMBENTUKAN PERKUMPULAN MASYARAKAT KREATIF



Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang disertai dengan kemajemukan suku, bahasa dan agama, serta memiliki keunikan atau ciri khas yang lain yaitu dilihat dari letak geografis daerah yang berada digaris khatulistiwa yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan waktu dan pembagian daerah yaitu Indonesia Timur, Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu metode yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan harus dapat memperhatikan keanekaragaman daerah dan keunikan daerah untuk melakukan pengembangan pembangunan di segala bidang kehidupan. Salah satu metode yang digunakan adalah metode *participatory rural appraisal* (PRA).

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sangat bertumpu kepada keikut sertaan masyarakat dalam setiap program pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat, sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Tujuan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan implementasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan kreatif. Dengan demikian, masyarakat adalah sebagai pelaku pembangunan dalam setiap program yang dilahirkan dan yang menerima manfaat langsung dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.

Melalui upaya yang dilakukan dengan model kelompok masyarakat kreatif diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan juga pengembangan pembangunan partisipatif masyarakat yang harus memiliki persiapan-persiapan tidak saja menyangkut masalah teknis pembangunan tetapi juga pemahaman terhadap arah kebijakan yang telah disepakati. Selanjutnya model kelompok masyarakat kreatif ini akan melakukan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan salah satu tahapan dalam melakukan pembangunan partisipatif.

Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pembangunan partisipatif adalah:

Tujuan:

1. Memberdayakan masyarakat
2. Mengaktifkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan
3. Mengefektifkan kinerja pemerintahan desa
4. Mengaktifkan peran dan kepedulian *stakeholder* (pengusaha) terhadap masyarakat
5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder

Sasaran:

1. Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Program Pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat
2. Pemerintah
3. *Stakeholder* (Pihak Swasta)

Metode Pembangunan Partisipatif

Metode yang digunakan dalam pengembangan pembangunan partisipatif adalah *metode participatory rural appraisal* (PRA). Langkah awal yang dilakukan dalam metode ini adalah menemukan masalah dan potensi pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya suatu gambaran tentang kondisi kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya sehingga menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pengembangan pembangunan partisipatif melalui kelompok masyarakat kreatif dilakukan oleh tim dan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 hari sampai 4 minggu. Tugas tim adalah menggali sebanyak mungkin informasi kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat.

Langkah-Langkah Penyusunan Kelompok Masyarakat Kreatif

1. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat
 - a. Menetapkan nama-nama kelompok
 - b. Menyiapkan program yang dilaksanakan
 - c. Memberikan panduan pelaksanaan kegiatan
2. Melaksanakan kegiatan
 - a. Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan
 - b. Menentukan kelompok-kelompok sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan.
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan
3. Prinsip kegiatan
 - a. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder

- b. Menghasilkan program kerja yang dapat memberikan kontribusi bagi kelompok masyarakat kreatif sebagai peningkatan kesejahteraan.
- c. Pemasaran sebagai peluang dalam memberikan pendapatan dari hasil kegiatan yang dilakukan.

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* (pengusaha) dalam pembangunan. Keterlibatan pihak-pihak ini dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pengembangan pembangunan partisipatif ini dilakukan dengan pembentukan kelompok masyarakat kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta; Pustaka Jogja Mandiri.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbitan FE-UI: Jakarta
- Afifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan; Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, Alfabeta; Bandung
- Arif, Syaiful dkk. 2012. *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Penyunting Happy Budi Febriasih. Malang; Averroes Press.
- Arsiyah., Ribawanto, Heru dan Sumartono. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal WACANA Volume 12 Nomor 2 April Tahun 2009 ISSN 1411 – 0199, Universitas Brawijaya: Malang.
- Asnudi, Andi. 2009. *Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia*, Jurnal SMARTEK Volume 7 Nomor 4 Tahun 2009, Universitas Tadulako, Palu akses Portal Garuda.
- Brayant, Carolie and White, Louise, G. 1982. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta; LP3ES
- Desa Paluh Manan dalam angka Tahun 2016
- Dusseldorp, D. B. W. M. 1981. *Participation in Planned Development Influence by Governments of Developing Countries at Local Level in Rural Areas*. Wageningen: Agricultural University.
- Eko, Sutoro. 2003. *Ekonomi Politik Pembaharuan Desa* Makalah disajikan dalam Pertemuan Forum VII, "Refleksi Arah dan Gerakan Partisipasi dan Pembaharuan Masyarakat Desa di Indonesia", yang digelar Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Ngawi , Jawa Timur, 15- 18 Juni 2003.

- Gitosaputro, Sumaryo dan Rangga, K. Kordiyana. 2015. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah). Yogyakarta; Graha Ilmu
- Hajar, Siti. 2012. *Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal KESKAP FISIP: Volume 10 Nomor 1 Edisi Jumadil Akhir 1433H/Mei 2012 M: UMSU-Medan.
- Hajar, Siti dan Tanjung, Syari, Tanjung 2013. *Pengembangan Pembangunan Partisipatif Dengan Model Kelompok Perempuan Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak*. Penelitian Internal Dosen Pemula: UMSU-Medan.
- Hajar, Siti. Et.al. 2017. Empowerment Community Coastal Through Village Potential. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 141*; International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)
- Hardinata. 2010. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Volume 3, No. 6, Desember 2010 ISSN: 1979 – 0899X
- Hobley, M. 1996. Participatory Forestry: The Process of Change in India and Nepal London: RDFN-Overseas Development Institute
- Kantor P dan K Kecamatan Hamparan Perak, Tahun 2016
- Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta; CIDES
- Kistanto, Nurdin. 1997. *Menuju Paradigma Penelitian Sosial yang Partisipatif* Jurnal Prisma Nomor 1 Edisi Januari 1997: Semarang.
- Leftwich, Adrian. 2000. States of Development: On The Primacy of Politics in Development. Cambridge; Polity Press.
- Maksudin. 2001. Strategi Pengembangan Potensi dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Volume 11 No.2 Desember 2001

- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan Publik)*. Bandung; Alfabeta.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Penerjemah Matheos Nalle. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor
- Mubyarto. 2002. *Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Tahun I Nomor 9 – November 2002. www.ekonomirakyat.org.
- Muluk, Khairul M. R. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya; ITS Press.
- Muslim, Aziz. 2007. *Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume VIII Nomor 2 Desember 2007: Yogyakarta.
- Riyadi dan Supriady, Deddy Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, Gramedia Pustaka Umum: Jakarta
- Seumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jakarta; Pradnya Paramita.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta; Buku OBOR
- _____. 2001. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung; HUP
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang; Setara Press.
- Soetrisno. 2010. *Pengaruh Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang)*. Universitas Diponegoro, Juni 2010.
- Tanjung, Irwan Syari dan Hajar, Siti. 2016. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Model Total Quality Service (TQS) dalam*

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Hamparan Perak.
Penelitian Hibah DIKTI: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Theresia, Aprilia et al. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Aman bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat).* Bandung: Alfabeta

Todaro, P.Michael. 1995. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga,* Erlangga; Jakarta

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wazir, Ach Ws. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat.* Sekretariat Bina Desa Dengan Dukungan AusAID Melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project: Jakarta.

Wignyotosoebroto, Soetandyo. 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi.* Pustaka Pesantren: Yogyakarta.

Zubaedi. 2014. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik).* Kencana: Jakarta.

<http://www.setgab.go.id/indeks.php>.

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR

SITI HAJAR, IRWAN SYARI TANJUNG
YURISNA TANJUNG, ZULFAHMI

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti sekaligus penulis dalam buku ini di Desa Paluh Manan Kabupaten Deli Serdang. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir untuk mendukung pembangunan desa di Desa Paluh Manan ini sangatlah rendah yang akhirnya tidak maksimal. Masyarakat pesisir yang berada di daerah ini, mempunyai pendidikan yang rendah dan mengakibatkan tidak berkembangnya pemikiran yang maju dari masyarakat sekitar desa ini. Maka, melalui model pemberdayaan masyarakat dapat melahirkan atau menciptakan masyarakat yang kreatif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di segala bidang. Masyarakat pesisir di Desa Paluh Manan ini masih belum bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap kemajuan desa, sehingga pemerintah desa harus dapat bekerja keras dan dapat mengajak masyarakat untuk bekerjasama membangun desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan focus grup discussion dan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat dilihat keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam membangun desa. Sedangkan, di masa ini telah adanya program dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana desa. Salah satu hasil yang diperoleh dalam model pemberdayaan masyarakat pesisir ini adalah terbentuknya perkumpulan masyarakat kreatif yang disingkat dengan PMK, kemudian perkumpulan ini di sahkan menjadi badan hukum dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, diharapkan perkumpulan ini dapat menjadi panutan atau contoh dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di segala aspek kehidupan.



LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENULISAN ILMIAH
AQLI

ISBN 978-602-53067-2-3

